MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS MARITIMDI KABUPATEN BANGKA TENGAH

by Lukmanul Hakim

Submission date: 02-Feb-2021 11:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 1499682999
File name: 21_IE_SEABC_LukmanulHakim.docx (188.75K)
Word count: 3413
Character count: 24225

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS MARITIMDI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Lukmanul Hakim[1]
Devi Valeriani Rulyanti[2]
Susi Wardhani [3]

(Dosen STIE APRIN/Mahasiswa S3 IE UNSRI
(Dosen FE UBB/Mahasiswa S3 IE UNSRI)
(Dosen FE UBB/Mahasiswa S3 IE UNSRI)

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung-STIE ARIFIN Palembang

Abstrak

Kabupaten Bangka Tengah bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai potensi hasil laut berupa tangkapan ikan dan sebagainya sangat mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi agar dapat meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah merancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan berbasis maritim. Metode penelitiannya deskriptif dengan metode survei, Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bangka Tengah di kecamatan yang potensial untukpengembangan hasil olahanlaut, yaitu kecamatan Koba dan Kecamatan Sungaiselan. Alasan memilih dua kecamatantersebut adalahkarenadaerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerahyang potensial menghasilkan komoditi unggulan sertanelayan sampel adalah nelayandi daerah yang hidupnya tergantung pada hasil laut.Teknik pengumpulan datadilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal.* Hasil dari penelitian merancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maritim dengan faktor pendukung akademisi, pengusaha, lembaga pembiayaan, pelaku usaha nelayan, instansi terkait dan koperasi sebagai badan usaha.

Kata Kunci : Model Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan, Maritim

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat saat ini telah banyak dilakukan diantaranya pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi desa serta peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menaikkan hasil produksinya yaitu berupa tangkapan ikan dan hewan laut.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan masyarakat serta menciptakan kemandirian masyarakat miskin.Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui konsep berbasis maritim sangat sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi saat ini yaitu (1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, (2) Berkomitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, (3) Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, (4) Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan adalah pilar keempat agenda pembangunan itu, (5) Sebagai negara yang menjadi titik

tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.

Seiring dengan kebijakan Presiden tersebut Kabupaten Bangka Tengah merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai potensi hasil-hasil laut berupa tangkapan ikan dan sebagainya sangat mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi agar dapat meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat. Diantara kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat nelayan.Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan saat ini hanya mengandalkan penjualan hasil tangkapan ikan sehingga sangat tergantung dengan kondisi cuaca, faktor ini menjadi penyebab lemahnya ekonomi nelayan di Bangka Tengah.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat yang bekerja sebagai nelayan untuk mengolah hasil laut menjadi makanan olahan yang lebih bervariasi adalah terobosan yang sangat tepat, sehingga masyarakat nelayan tidak lagi bergantung kepada hasil tangkapan ikan saja namun mempunyai alternatif usaha yang menjadi peluang dalam meningkatkan ekonomi keluarga.Perkembangan sektor kelautan di Kabupaten Bangka Tengah cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha nelayan belum meningkat seperti yang diharapkan, hal tersebut memacu Pemerintah Daerah Bangka Tengah untuk mencapai sasaran pembangunan yaitumeningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang berorientasi kepada ekonomi masyarakat, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi dan produktivitas sumber daya bahari.

II. STUDI PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yangmerangkum nilai-nilai sosial.Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,yakni yangbersifat" *people centred, participatory, empowering, and sustainable"*(Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhandasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinanlebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diridari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain,pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakatberkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).Dalam rangka pemberdayaan ini, upayanya adalah peningkatan tarafpendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai inputseperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacupercepatan kegiatan sosial ekonomimasyarakat. Proses ini diarahkan untukmeningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan

modal yangbersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakanpendapatan yang dinikmati oleh masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidakdijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upayapembangunannya sendiri.Konsep pemberdayaanmasyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: Pertama, upaya itu harusterarah. Secara populer disebut pemihakan.Upaya ini ditujukan langsungkepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasimasalahnya dan sesuai kebutuhannya.Kedua, program ini harus langsungmengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakatdengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.Ketiga,menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskinsulit dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Maritim

Pemberdayaan masyarakat berbasis maritim adalah pengelolaan sumberdaya perikanan oleh Pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat dengan Pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya seperti hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak eksklusif, dan hak mengalihkan (Perkins, 1995) mengatakan bahwa Pemerintah harus terlibat atau campur tangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan karena tiga alasan berikut ini: (1) Pemerintah ikut mengelola sumberdaya perikanan karena alasan efisiensi, (2) Pemerintah terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan supaya keadilan dapat diwujudkan, (3) Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam hal mengelola sumberdaya perikanan karena alasan administrasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bangka Tengah di kecamatan yang potensial untukpengembangan hasil olahanlaut, yaitu kecamatan Koba dan Kecamatan Sungaiselan.Alasan memilih dua kecamatan tersebut adalah karena daerah yang terpilihsebagai sampel merupakan daerahyang potensial menghasilkan komoditi unggulansertanelayan sampel adalah nelayandi daerah yang hidupnya tergantung padahasil laut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA),yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data atau informasi danpenilaian(*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek.Kelebihanpendekatan ini adalahpenelitian bisa mencakup daerah yang lebih luasdalam wakturelatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum.

Metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasidan Yang dibutuhkan sesuaidengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebihmendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif. Hasil analisis kualitatif akan menemukan bentuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan berbasis maritim.

Informasi pada penelitian ini menggunakan data primer, antara lain: (1) Data dari birokrasi pedesaan dan pemuka masyarakat berupa potensi sumberdaya yang ada,

bentuk perekonomian masyarakat, komoditas unggulan dankebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai nelayan, sertadiversifikasiusaha hasil tangkapan, olahan laut danpemilikan factorproduksi oleh masyarakat, (2) Data darimasyarakat berupa kegiatan usaha nelayan, pola usaha nelayandanpenggunaan faktor produksi nelayan, produksi, harga jual, rantaipemasaran, kontribusi pendapatan, dan tingkat kemampuan nelayan sertamasalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan, (3) Lembagatataniaga yang berhubungansecara langsung dengan ekonomimasyarakat.

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Kebijakan Pemerintah pusat saat ini sangat strategis pada bidang kemaritiman dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Banyak masyarakat di Indonesia terutama di daerah kepulauan hidup sebagai nelayan, walaupun kontribusi sektor kelautan masih di bawah sektor pertanian namun masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian Negara, sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat termasuk didalamnya adalah pemberdayaan masyarakat nelayan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup nelayan agar lebih baik.

Pembangunan industri hasil olahan laut harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor primer sedangkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang lebih baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat nelayan maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi para nelayan, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan berbasis maritim yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Gambaran keadaan penduduk yang diperoleh pada dua kecamatan bahwa Kabupaten Bangka Tengahmemiliki luas wilayah 2.126,36km^2 terdiri dari 6 kecamatandan 57 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengahdi tahun 2011 (Susenas 2011) sebanyak 166.294 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 78orang per km^2, yang tersebar 75,63 persen di kota dan 24,37persen di kota. Gambaran jumlah sebaran penduduk di pedesaan dan perkotaan Kabupaten Bangka Tengah seperti berikut;

Gambar.1. Distribusi Penduduk di Pedesaan dan Perkotaan

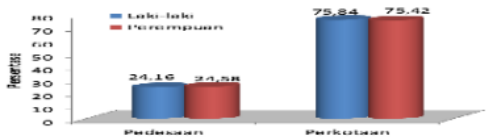

Sumber: Susenas 2011

Pada sampel kecamatan yang menjadi objek penelitian yaitu Kecamatan Kota jumlah penduduknya sebanyak 34.808 Jiwa dan Kecamatan Sungaiselan sebanyak 30.078 Jiwa. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di KabupatenBangka Tengahterfokus pada 4 (empat) sektor, yaitu pertambangan dan penggalian (dengan jumlah pekerja di sektor ini sebesar 35,63 persen dari total pekerja), diikuti sektor pertanian perikanan dan kelautan (jumlah pekerja sektor ini sebesar 26,69 persen dari total pekerja), kemudiansektor perdagangan, hotel dan restoran(jumlah pekerja sektor ini sebesar 15,30 persen)dan sektor jasa-jasa dimana jumlah pekerja di sektor ini sebanyak 12,33 persen dari total pekerja.

Nelayan yang ada di 2 (dua) kecamatan yang menjadi objek penelitian tercermin dalam tenaga kerja pada sektor pertanian perikanan dan kelautan dengan jumlah

sebesar 26,69 persen dari total pekerja, yang termasuk dalam 3 (tiga) besar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bangka Tengah.Angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bangka Tengah nelayan bukan merupakan mata pencaharian pokok masyarakat namun perlu dikembangkan dan diberdayakan agar kesehteraan nelayan dapat meningkat dan mandiri.

Masyarakat nelayan perlu di dorong dalam pengelolan hasil tangkapan ikan agar dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi, permasalahan ini menjadi suatu dilema karena nelayan lebih senang menjual hasil tangkapan langsung karena dapat menerima hasil penjualan pada hari itu juga. Berbeda dengan hasil tangkapan yang di olah, produk yang di hasilkan harus melalui proses yang memerlukan tenaga dan waktu lebih lama dalam mendapatkan uangnya. Kendala lain adalah sistem pemasaran yang dijalankan dan variasi produk yang dihasilkan masih bersifat konvensional. Permasalahan ini perlu ditemukan suatu alternatif pemecahan solusinya dengan cara membuka daerah pemasaran produk nelayan, memberi pelatihan pengolahan hasil laut, membuat standar dalam pengemasan, membantu dalam penyediaan alat-alat produksi serta membantu dalam promosi.Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungaiselan.

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Berbasis Maritim

Sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan berbasis maritim adalah semua aktifitasnya dimulai dari penangkapan hasil laut, pengolahan dan penyaluran hasil produksi sampai kepada pemasaran produk-produk ke pasar. Proses ini saling terkait satu sama lain yang merupakan suatu sistem yang meliputi: (1) Sistem pengadaan bahan baku (hasil tangkapan), (2) subsistem produksi, (3) sistem pengolahan, (4) subsistem pemasaran, (5) subsistem kelembagaan. Agar semua sistem dapat berjalan sesuai dengan konsep berbasis maritim dan kebutuhan pasar, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasiskan maritime dengan melibatkan beberapa lembaga pendukung.

Hasil pengamatan di lapangan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi masyarakat nelayan yang berbasis maritim, antara lain: (1) Peran Akademisi, (2) Pengusaha, (3) Lembaga Pembiayaan, (4) Nelayan, (5) Instansi Terkait dan, (6) Koperasai sebagai Badan Usaha. Sistematika kerja dari faktor pendukung ekonomi masyarakat nelayan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Berbasis Maritim.

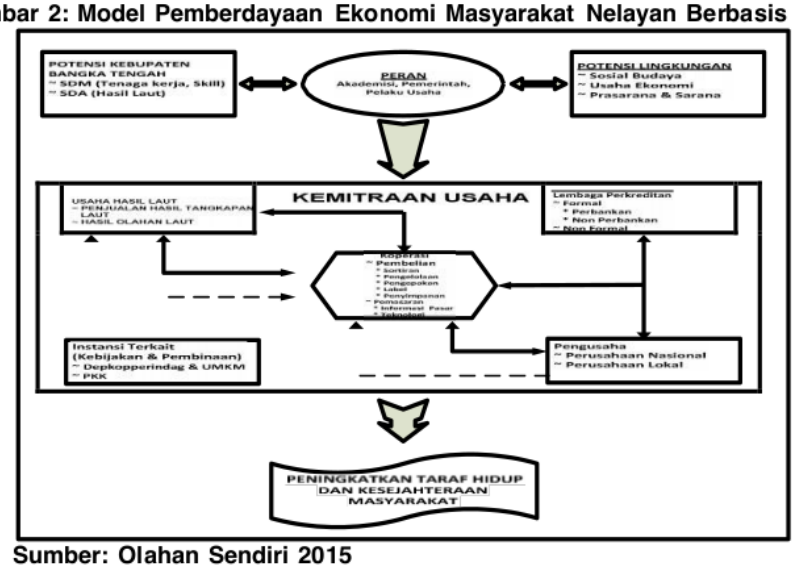

Sumber: Olahan Sendiri 2015

Peran Akademisi

Peran Akademisi melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarat sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Peran Akademisi memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama Akademisi harus memetakan dan menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian pengelolahan hasil laut serta komoditi unggulan daerah Bangka Tengah. Dimensi kedua memetakan potensi lingkungan masyarakat nelayan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budaya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok usaha nelayan berbasis maritim. Di samping itu sebagai lembaga independen, Akademisi merupakan lembaga pemantau dan pendampingan dalam hal produksi dan pemasarankegiatan berbasis maritim di pesisir pantai.

Pada kelompok mitra usaha berbasis maritim terlibat lima kelompok pelaku pendukung yaitu; lembaga ekonomi daerah nelayan (koperasi), Pelaku Usaha Nelayan (penjualan hasil tangkapan laut dan hasil olahan laut), Lembaga Pembiayaan, dan Instansi Pemerintah. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maritim di Kabupaten Bangka Tengah.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pelaku usaha (perantara, penyalur, pengecer).Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat atau mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan berbasis maritim. Fungsi pelaku usaha disini sebagai penyalur produk penjualan hasil tangkapan dan hasil olahan laut yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang di tentukan oleh pelaku usaha. Target pasar disesuaikan dengan kreteria produk yang ada bisa saja ekspor,swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Disisi lain pelaku usaha juga dapat memberikan informasi pasar melalui koperasi terkait menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, promosi dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi.Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan pada kegiatan berbasis maritimmempunyai peranan yang besar. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pelaku usaha.Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasismaritim, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pelaku usaha.Kredit disalurkan melalui koperasi di pesisir pantai yang sudah mempunyai bentuk usaha berbasis marirtim.Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku usaha berbasis maritim).Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha.

Pengusaha Nelayan

Kurang berkembangnya kegiatan pengolahan hasil tangkapan laut menjadi produk hasil olahan laut yang berbasiskan maritim di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungaiselan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi masyarakat nelayan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk hasil tangkapan laut dan hasil olahan laut di pesisir pantai. Oleh karena itu hasil tangkapan laut dan hasil olahan laut harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di Kecamatan Koba dan

Kecamatan Sungaiselan.Nelayan melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil laut didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi,dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara koperasi dan pelaku usaha. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada pelaku usaha, antara lain; (1) Adanya jaminan pasar produk hasil tangkapan laut dan hasil olahan laut bagi pelaku usaha; (2) Pelaku usaha terhindar dari risiko fluktuasi harga; (3) Pelaku usaha mendapat tiga keuntungan, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk laut, keuntungan dari pembagian sisa usaha oleh koperasi pada akhir tahun, dan keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada koperasi dan (4) Adanya hubungan kemitraan usaha antara koperasi dan pelaku usaha.

Instansi Terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayanberbasismaritim diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku usaha berbasis maritim.Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan pelaku usaha.Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari akademisi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Koperasi Sebagai Badan Usaha

Untuk mengembangkan usaha berbasis maritim skala kecil perlu dibentuk koperasi.Tanpa koperasi tidak mungkin nelayansebagai pelaku usaha pengolahan hasil laut dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001).

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha bagi masyarakat nelayan dan pelaksana penuh kegiatan yang berbasis maritim tersebut.Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat atau mesin dalam pelaku usaha penjual hasil laut maupun hasil olahan laut kepada anggota.

Sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk hasil maupun olahan hasil laut yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk laut.Koperasi dapat membantu nelayan dalam memaksimalkan pengolahan hasil laut diantaranya melalui kegiatan penyortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, tentang kondisi peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk hasil olahan laut, sehingga pelaku usaha nelayan tidak ragu untuk melakukan kegiatannya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akanmendorong partisipasi anggota terhadap koperasi, yang akhirnya akantercipta kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk laut, mesin dan alat hasil dan olahan laut harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi, dengan demikian konsep pemberdayaan ekonomi berbasis maritime dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pengolahan hasil tangkapan dan hasil olahan laut yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh nelayan dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil penangkapan dan olahan laut kepada koperasi.

Koperasi sebagai unit usaha yang secara umum mencakup bidang-bidang

usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokan kepada lima komponen utama, yaitu; (1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin hasil tangkapan dan olahan hasil laut; (2) bidang usaha dalam produksi komoditas laut; (3) bidang usaha industri pengolahan hasil laut; (4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil laut dan pengolahannya; dan (5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan (Almasdi Syahza, 2003).

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maritim yang terencana dengan baik dalam pembangunan sektor ekonomi merupakan kebijakan yang strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kontibusi terhadap pemerintah daerah melalui sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta sektor industri pengolahan. Untuk itu diperlukan faktor pendukung pembangunan ekonomi berbasis maritim, antara lain:(1) Akademisi; (2) Pengusaha; (3) lembaga Pembiayaan; (4) Pelaku Usaha Nelayan;(5) instansi terkait; dan (6) koperasi sebagai badan usaha.
2. Akademisi memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, antara lain: (1) Menggali dan Memetakan potensi wilayah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA); (2) Mengetahui potensi lingkungan masyarakat nelayan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana; (3) Memberikan rekomendasi dari hasil perpaduan peran pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha berbasis maritim.
3. Koperasi merupakan motor penggerak pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha pelaksana penuh subsistem berbasis maritim.

Saran

1. Agar semua subsistem berbasis maritim dapat berjalan sesuai dengan tuntutan pada masyarakat nelayan, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakatnelayan berbasis maritim dengan melibatkan beberapa lembaga pendukung dalam bentuk kelompok mitra usaha berbasis maritim, yaitu: lembaga ekonomi (koperasi), pelaku usaha hasil tangkapan dan olahan laut, lembaga pembiayaan, pengusaha, dan instansi pemerintah.
2. Investasi yang dilakukan oleh koperasi pada kegiatan berbasis maritim harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Setiap anggota harus mempunyai saham kepemilikan aset koperasi pelaku usaha tangkapan dan olahan hasil laut. Dengan demikia konsep ekonomi berbasis maritim akan berkembang.

VI.DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2003.Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di Dalam dan Di Sekitar Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.

BPS: Bangka Tengah dalam Angka, 2013.

Chambers, Robert, 1995 Poverty and livelihoods:whose reality counts? Journal Environment and Urbanization, Vol. 7, No. 1, April 1995

Christines, Brian , 2012 Oxford University Press and Community Development Journal, Targeting empowerment incommunity development: acommunity psychologyapproach to enhancing local power and well-being

Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Gregorius Sahdan 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.

Perkins, Douglas Empowerment theory, research, and application American Journal of Community Psychology; Oct 1995; 23, 5; Research Library Corepg. 569

PPDM ITS, 2013, Laporan Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tengah.

Saragih, Bungaran, 2001, Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis, Yayasan Usese, Bogor.

Syahza, Almasdi, 2001. Studi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, PPKPEM Unri, Pekanbaru.

Syahza, Almasdi, 2003, Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Provinsi Riau, Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol 3 No 2 Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS MARITIMDI KABUPATEN BANGKA TENGAH

ORIGINALITY REPORT

9%	0%	9%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Ratna Indrawasih. "REVITALISASI LEMBAGA ADAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT UNTUK MEMBANGUN KEMBALI BUDAYA BAHARI", Kebudayaan, 2018 Publication	2%
2	Budiman Yunus, Dan Basse Siang Parawansa. "MANAGEMENT OF SILVOFISHERY PONDS BASED ON PUBLIC KNOWLEDGE AND MOTIVATION IN COASTAL AREA OF PANGKEP REGENCY", International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 2020 Publication	1%
3	Sukmaniar, Agus Joko Pitoyo, Andri Kurniawan. "Urbanization philosophical perspective of slum settings in The City Of Palembang", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020 Publication	1%
	Yuyun Yuningsih, Sumardani Sumardani, Umi	

4	Hani. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembuatan Pupuk Cair Di Desa Wanayasa Kapupaten Purwakarta", KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2020 Publication	1%
5	Bernardus Seran Kehik. "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan", AGRIMOR, 2018 Publication	1%
6	Dayat Hidayat. "Teknik Identifikasi Kebutuhan Belajar Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelatihan Kewirausahaan", Comm-Edu (Community Education Journal), 2020 Publication	1%
7	Feigs, Florian(Lienau, Cay). "Die Rolle der Privatwirtschaft in der post-konfliktiven Regionalentwicklung in Bosnien-Herzegowina am Beispiel der Stadtregionen Tuzla und Mostar", Münster University, Germany, Document Server, 2009. Publication	<1%
8	Agus Lukman Hakim. "Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2019 Publication	<1%
9	Andrea del Campo, Soledad Ruiz.	

"Empoderamiento de Trabajadoras de Casa Particular Sindicalizadas", Psykhe (Santiago), 2013
Publication

<1%

10 Luki Natika, Nuraida Nuraida. "Kinerja Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Subang Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2020
Publication

<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		